

Dengan adanya pemisahan yang tidak resmi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik ini, berarti pejabat publik di Bangkalan telah menyerahkan kompetensi dalam bidang hukum agama ke tangan para kiai sepenuhnya. Sehingga, pejabat memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada kiai dalam masyarakat Bangkalan. Itulah sebabnya pengaruh mereka sangat kuat. Bersamaan dengan sikap enggan mereka pada urusan-urusan kenegaraan, maka pengaruh yang besar itu memberikan pula kekuasaan moral yang luar biasa, dan mempersembahkan kepada mereka kedudukan sebagai suatu kelompok intelektual yang menonjol.

Namun demikian, pengaruh kuat Bani Kholil di Bangkalan menjadi faktor yang tidak terelakkan. Fakta sejarah, pesantren-pesantren yang didirikan oleh *dzurriyahnya* dan kearifan lokal patuh (*ta'dhim*) kepada kiai membuat relasi bapak-anak antara kiai pesantren dan pejabat publik begitu mengakar di Kabupaten Bangkalan ini.

2. Relasi Kolegial

Relasi kolegial adalah sebuah ikatan atau interaksi yang dilakukan secara bersama-sama layaknya teman sejawat (kolega). Dalam hal kepemimpinan, untuk mengambil keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan koordinasi, yang mana semua pihak ikut secara langsung dalam proses tersebut. Perkembangan kedekatan hubungan antara kiai dan pejabatan publik di kabupaten Bangkalan secara hirarkies mengalami pola yang demikian. Sebagaimana penuturan KH. Syafik Rofi'i, mantan wakil bupati di masanya Kiai Fuad Amin sekaligus pengasuh pondok pesantren An-Nafiiyah yang beralamatkan di jalan Moh Yasin

yang signifikan khususnya dalam hubungannya dengan pemerintah. Kemudian pemerintah yang ada waktu itu juga tidak cukup memberikan ruang yang leluasa untuk munculnya kebijakan-kebijakan yang mendukung kepada arah pengembangan pesantren. Sehingga ada kelompok yang kontra kepada pemerintahan yang ada dari kalangan pesantren yang kebetulan itu adalah saya sendiri yang kontra itu..”

Pandangan Kiai Imam di atas menjadi antitesis bagi penulis terkait tujuan hubungan antara kiai dan pejabat publik juga partisipasi kiai dalam pemerintahan di Bangkalan. Perbedaan perspektif ini pula menjadi warna tersendiri pada relasi kuasa kiai dan pejabat publik di kota dzikir dan shalawat ini. Maka penulis memperoleh temuan bahwa kiai dan pejabat publik tidak selalu memiliki hubungan relasional secara ideologis. Di sisi lain, relasi kuasa kiai dan pejabat publik di Bangkalan juga kontras dengan beberapa pihak yang berada di luar lingkaran pemerintahan.

Berikut adalah tabel bentuk relasi kuasa kiai pesantren dengan pejabat publik di Bangkalan:

Tabel 4.1

Bentuk Relasi Kuasa Kiai Pesantren dengan Pejabat Publik

No	Bentuk Relasi	Keterangan	Figur
1	Paternalistik	Relasi paternalistik merupakan bentuk hubungan pemimpin dan yang dipimpin atau bapak dan anak, dalam konteks ini antara kiai dengan pejabat publik.	1. KH. Fuad Amin. 2. KH. Syafik Rofii 3. KH. Busro Damanhuri. 4. K. Makmun Ibnu Fuad.
2	Kolegial	Relasi kolegial adalah sebuah ikatan atau interaksi yang dilakukan secara	1. KH.Mondir Rofi'i 2. KH. Syafik Rofi'i.

2. Partisipasi Moderat

Bentuk partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan yang kedua adalah partisipasi moderat, bisa diartikan partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan sifatnya tidak terlalu terlibat secara langsung (tidak mencolok), tidak aktif tidak pula pasif. Dalam partisipasi ini, kiai berfungsi sebagai legitimasi politik yang sering dimanifestasikan dalam bentuk restu politik kepada pemerintah daerah baik yang berasal atau tidak berasal dari lingkungan pesantren. Hal seperti itu bagi banyak praktisi politik dianggap penting, sebab dalam sistem politik Indonesia yang ideologis dan tradisional, legitimasi keagamaan sangat dibutuhkan. Dan citra sebagai seorang Muslim yang baik, sholeh, serta dekat dengan ulama turut menentukan elektabilitas seorang praktisi politik di hadapan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, pesantren sering menerima “order” kunjungan politisi, calon anggota legislatif, atau komunitas partai politik tertentu. Hal itu dilakukan sebagai proyek pemoleksaan citra diri sebagai seorang Muslim yang baik yang dekat dengan komunitas agama atau kiai. Hal ini bisa dilihat ketika para pemangku jabatan datang ke pesantren-pesantren untuk meminta restu politik kepada para kiai. Di sisi lain, dalam berbagai kegiatan pemerintahan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan, kiai diminta pendapat sekaligus legitimasi. Berikut hasil Musrembang pada tahun 2015:

disertai aktivitas-aktivitas partisan sesuai tuntutan kepentingan politik yang terkadang tidak sejalan dengan logika masyarakat umum.

Namun, di sini konotasi partisipasi kiai dalam pemerintahan adalah lebih kepada penentuan kebijakan, terutama kebijakan pendidikan di Bangkalan. Di sini kiai dan pesantren dapat memertahankan legitimasi keagamaannya karena masyarakat meyakini otoritas yang dimiliki, yakni kiai sedang berbicara atas dasar kepentingan agama dan kepentingan masyarakat.

Fenomena politik yang berkaitan dengan partisipasi kiai dalam menentukan kebijakan pendidikan Islam di Bangkalan menunjukkan bahwa aktivitas politik kiai ternyata memiliki implikasi-implikasi. Analisis terhadap hal ini bisa dimulai dari perdebatan doktrinal keagamaan tentangan hubungan agama dan negara di Indonesia, hingga dampak-dampak material yang mungkin diperoleh oleh pesantren. Namun demikian, partisipasi tersebut juga berdampak pada pembangunan Bangkalan, terutama melalui jalur pendidikan Islam. Maka, kiai ikut serta dalam penentuan kebijakan pendidikan Islam bukanlah sebuah frasa sederhana, tetapi memiliki implikasi yang luas yang mesti dianalisis secara hati-hati.

Setidaknya menurut pandangan penulis ada tiga implikasi yang di timbulkan dari partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan karena itu merupakan konsekwensi logis dari adanya relasi kuasa antara kiai dan pejabat publik juga partisipasi mereka dalam penentuan kebijakan pendidikan yang di antaaranaya:

Melihat pernyataan dan pandangan pengasuh, para santri dan alumni yang sudah menjadi pejabat di atas, dapat ditemukan bahwa demokratisasi di pesantren di Bangkalan belum berjalan sesuai dengan esensinya. Karena demokrasi mengajarkan bahwa perilaku yang lahir dari sebuah proses pendidikan politik dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dipengaruhi pula oleh interaksi sosial setiap individu. Dalam proses tersebut ada nilai-nilai tertentu secara normatif diyakini dan dilaksanakan oleh setiap individu.

Pendidikan politik mencoba mengembangkan prinsip-prinsip musyawarah yang akan diterapkan pada warga negara sebagai landasan pola pikir dalam membangun partisipasi politik warga negara.³³³ Partisipasi politik warga negara dapat diwujudkan dalam bentuk pengambilan kebijakan yang didasarkan pada kebebasan memilih dan menentukan keputusan yang dibuat. Dengan demikian pendidikan politik menghargai hak setiap individu untuk memilih dan mengambil keputusan politik tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta berpartisipasi dalam sistem yang ada.

Apabila pola yang dilakukan cenderung searah, yaitu secara sepihak memposisikan santri sebagai yang dirugikan tentunya keseimbangan dalam sistem budaya pesantren itu belum tercapai. Artinya kepatuhan tersebut hanya didasarkan pada atas tradisi yang keliru dan dapat dikatakan sebagai non-ideologis, tetapi hanya merupakan cikal entropi kultural pesantren karena tidak menempatkan

³³³ Pendidikan politik memiliki tujuan untuk menarik individu untuk memahami politik sehingga menjadi warga negara yang bertanggungjawab dengan mencoba bagaimana menganalisis dan memberikan penilaian terhadap situasi politik yang sedang berlangsung secara mandiri.

Konsep “pesantren sebagai sebuah kerajaan kecil” sama sekali bukan bentuk yang ideal bagi pengembangan demokratisasi dunia pesantren. Bahkan, asumsi ini justru membuat batasan non visual dan menciptakan kesenjangan antara pribadi kiai dan santri. Keadaan ini tentunya kurang baik bagi proses pengembangan potensi diri santri.

Kesenjangan yang terjadi dalam proses interaksi sosial antara kiai dan santri ini menimbulkan akses negatif dalam bentuk ikatan batin semu antar kedua belah pihak, yang akan mudah terkikis oleh waktu. Ikatan batin yang terbentuk hanya menyentuh pada permukaan dimensi terluar dari hubungan antara guru dan murid lebih banyak didasari oleh perasaan segan, sungkan, takut kualat, dan sebagainya. Demikian pendidikan dilakukan tidak dapat mencapai pada tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Dengan berkembangnya proses musyawarah dalam dunia pesantren, akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan terhadap setiap individu yang menjadi elemen dari pondok pesantren. Dengan terbukanya suasana demokratis, diharapkan masing-masing pihak dapat berlomba-lomba dalam kebajikan (*fastabiqu al-khaira*).

Dari gambaran tentang dominasi kiai terhadap santri, pejabat publik dan masyarakat, sebagai implikasi partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan terhadap pendidikan Islam di Bangkalan ditemukan: *pertama*, partisipasi politik warga pesantren di Bangkalan tentang pilihan politik masih terpatron kepada kiai. Pilihan politik yang di dasarkan pada kebebasan memilih dan menentukan keputusan yang di buat sendiri tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Karena demokrasi menghargai hak setiap individu untuk memilih dan mengambil keputusan politik tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta berpartisipasi dalam sistem yang ada.

Kedua, nilai-nilai muyawarah di pesantren tidak hanya dilakukan dengan para kiai, namun juga dengan asatidz, pengurus, dan para santri, dalam bentuk dialog, *bahtsul masa'il*, dan diskusi antar santri. Namun sebagai sandaran, kiai tetap menjadi figur sentral di dalamnya. *Ketiga*, pesantren di Bangkalan menganut sistem kepemimpinan mutlak, yaitu segala sesuatu pada akhirnya berada pada keputusan kiai. Hal ini diamini oleh kiai, santri, dan masyarakat sebagai kearifan lokal di pesantren di Bangkalan. Sehingga segala bentuk kebijakan pendidikan di Bangkalan harus selaras dengan kiai, baik yang di dalam lingkaran pemerintahan ataupun yang di luar pemerintahan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam di Bangkalan

Dalam kesehariannya keberadaan seorang kiai biasanya tidak bisa dilepaskan dari peranannya sebagai pengelola lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren. Basis utama kegiatan seorang kiai dalam kesehariannya adalah mengurus santri dan pesantrennya.

Secara umum, partisipasi kiai dalam pemerintahan berimplikasi terhadap eksistensi sebuah pesantren. Sebagian kalangan berpendapat bahwa bagi pesantren yang kiaiinya terlalu sibuk dalam pemerintahan, akan berkurang waktu dan perhatiannya dalam mengurus pesantren. Hal itu disebabkan aktivitas politik membuat para kiai harus sering keluar untuk koordinasi, rapat, dan kegiatan

pemerintahan dengan kegiatan kepesantrenan, sehingga politik praktis yang dijalankannya tidak berpengaruh besar terhadap kegiatan pesantren yang diasuhnya.

Menjalankan fungsi pendidikan memang menjadi tugas pokok sebuah pesantren. Identitas pesantren adalah lembaga pendidikan, walaupun dalam perjalanannya berbagai fungsi juga dijalankan oleh lembaga ini. Namun demikian, peran pesantren sebagai lembaga pendidikan adalah yang utama. Dan peran kiai sebagai pengasuh sekaligus pengajar juga tidak kalah pentingnya.

Sementara itu, perkembangan pesantren tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi kualitas dan kuantitas santri juga menentukan pesantren dikatakan maju dan berkembang. Peran penting pesantren dalam proses pelaksanaan pembangunan sosial di sektor pendidikan secara khusus tidak senantiasa berada pada titik konstan, tetapi juga mengalami pasang surut.

Seperti contoh, ketika pesantren masih menjadi satu-satunya kiblat pendidikan, peran lembaga pendidikan dengan kiai sebagai figur tokoh informalnya memiliki posisi dan peran yang sangat menentukan. Tetapi ketika dunia pendidikan semakin dipenuhi oleh lembaga-lembaga modern yang menawarkan keunggulan sistem pendidikan, kurikulum yang terprogram secara sistematis, SDM tenaga pengajar yang handal dan pengelolaan yang profesional, semakin menggeser keberadaan pesantren.

Namun, tidaklah demikian dengan pesantren di Bangkalan, walaupun dunia pendidikan telah dipenuhi oleh lembaga-lembaga yang sudah modern, beberapa pesantren mampu menjawab tantangan tersebut, hal ini terbukti dengan

Dalam beberapa tahun terakhir Kiai Fahri mengurangi perannya dalam partisipasinya di dalam penentuan kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan karena di samping Kiai Fahri menjalankan misi religiusnya dengan membumikan shalawat melalui sebuah “Ahabul Musthofa Bangkalan”. Sebuah grup shalawat yang langsung dipimpin oleh kiai Fahri untuk mewujudkan Bangkalan Kota Dzikir dan Shalawat yang pernah diusulkan kiai Fahri dengan beberapa kiai lain kepada pemerintah daerah Bangkalan, sebagai media relegi dan edukasi bagi masyarakat Bangkalan. Selain itu, Kiai Fahri juga lebih disibukkan dengan dinamika yang terjadi di pesantren. Dalam dua tahun terakhir perkembangan santri yang masuk ke pesantren sangat banyak, sementara infrastruktur dari segi sarana dan prasarana belum siap. Maka pembangunan pesantren terus dilanjutkan guna berjalannya proses pendidikan dengan baik.

Di tengah arus global, pondok pesantren Syaikhona Kholil telah membangun sebuah perguruan tinggi, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Syaikhona Kholil (STAIS) Bangkalan. Sebuah kampus yang didirikan tidak hanya untuk santri yang mondok di pesantren Syaikhona Kholil, namun juga institusi pendidikan Islam untuk masyarakat Bangkalan. Hal ini ditegaskan oleh Kiai Fahri dalam wawancara berikut ini:

“..Saya sudah tidak terlalu aktif untuk ikut serta dalam penentuan kebijakan di Bangkalan akhir-akhir ini. Karena saya lebih mengarahkan perhatian kepada sebuah misi religi, yakni membumikan shalawat melalui “Ahabul Musthofa Bangkalan”. Jadi saya keliling Bangkalan, bahkan Madura untuk mewujudkan kota ini sebagai kota dhikir dan sholawat. Ini tidak terlepas dari saran saya dan para kiai kepada Bupati, DPR dan sebagainya. Saya juga lebih memusatkan perhatian kepada pendidikan di internal pesantren. Di sini sudah didirikan perguruan tinggi, sebuah kampus yang tidak hanya dikhususkan bagi santri, tapi

Gambar 4.3
PERDA Pendidikan Tahun 2015

<p style="text-align: center;">PERDA PENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Bentuk dan Program Pendidikan Non Formal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none">1. Satuan Pendidikan non formal berbentuk:<ol style="list-style-type: none">a. Lembaga kursus;b. Lembaga pelatihan;c. Kelompok belajar;d. PKBM;e. Majelis taklim;f. Madrasah diniyah;g. Pesantren;h. TPA/TPQ; dani. PAUD2. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.3. Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan non formal.4. PKBM memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan non-formal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasikan kebutuhan akan pendidikan sepanjang hidup, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.5. Majelis taklim menyelenggarakan pembelajaran agama islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan non-formal.6. Madrasah diniyah menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam berbasis diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.7. TPA/TPQ menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.8. PAUD menyelenggarakan pendidikan pembinaan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar yang dapat berbentuk KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat.
--

gelanggang politik akan berimplikasinya nyata dalam perubahan pesantren dan tentunya pundi-pundi kekayaan kiai akan bertambah dengan sendirinya. Lebih dari itu, jaringan kiai dengan kekuasaan (pemerintah) semakin kokoh. Hal ini akan semakin mengokohkan peran dan posisi kiai di tengah masyarakat. Namun, apa yang telah dilakukan oleh kiai dalam pemerintahan pada dasarnya berorientasi pada faktor pribumisasi nilai-nilai Islam, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan pengembangan pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang lain.

Kedua, kiai yang masih canggung dalam hal berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan. Karakteristik kiai seperti ini berada di luar lingkaran pemerintah, lebih pasif, namun tetap memberikan saran-saran dalam penentuan kebijakan pendidikan Islam di Bangkalan. Walaupun pesantren mereka mendapat bantuan dari pemerintah, namun tidak lantas hal tersebut menjadikan pesantren mengalami ketergantungan dengan para pemangku jabatan. Di sisi lain, jaringan kerja secara pribadi (kiai) dan kelembagaan (pesantren) masih terus dijalin.

Ketiga, kiai yang hanya sebagai jembatan penghubung masyarakat dengan pemerintah, kewajiban untuk meyakinkan dan menindaklanjuti apa yang telah menjadi saran masyarakat terkait kondisi Bangkalan pada umumnya dan pengembangan pendidikan Islam di Bangkalan. Hal ini dilakukan kiai ketika ceramah di desa-desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sebelum ceramah biasanya ada dialog kecil antara kiai dengan warga masyarakat, terutama panitia yang mengundang kiai untuk ceramah.

Liberalisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan yang semakin massif di Indonesia akhir-akhir ini, secara tidak terelakkan juga menimpa pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang dikelola secara swadaya oleh kiai dan masyarakat. Biaya operasional pendidikan yang semakin tinggi berdampak langsung pada kondisi finansial pesantren.

Situasi tersebut sering mendorong para kiai dan pengelola pesantren memikirkan cara-cara lain yang mudah dan efektif untuk memperoleh bantuan yang bisa digunakan dalam pembangunan pesantren. Tidak jarang pesantren menempuh jalan pintas dengan melibatkan diri dalam politik kekuasaan yang dianggap cara yang cepat dan efektif untuk membangun jaringan donasi baru. Dengan pengaruh modal sosial dan politik yang kuat di masyarakat, pesantren dapat melakukan *bargaining* politik dengan para politisi yang memerlukan dukungan politik pesantren, dari sekadar dukungan moril dan pembentukan citra hingga mobilisasi suara rakyat dalam pemilu, pilpres, atau pilkada atau mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah baik dalam pendidikan, ekonomi ataupun yang lain. Meskipun secara terbuka pihak pengelola pesantren sering membantah melakukan tawar-menawar politik dengan kompensasi ekonomi.

Implikasi dari partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan juga terlihat pada perubahan sarana fisik pesantren. Hal itu membenarkan penjelasan teori ekonomi politik deterministik yang memandang bahwa interaksi-interaksi politik selalu bermotif ekonomi.³⁵² Pesantren

³⁵² Hubungan sistematis dalam teori ekonomi politik dapat dilihat pada tiga kemungkinan. Pertama, terdapat hubungan kausal antara ekonomi dan politik yang dalam hal ini sering disebut model ekonomi politik deterministik. Model ini mengasumsikan ada hubungan deterministik antara ekonomi dan politik, yakni politik menentukan aspek-aspek ekonomi dan institusi ekonomi

menjadikan pengaruh dan legitimasi sosial kegamaan yang dimilikinya sebagai bahan dalam tawar-menawar dengan kepentingan kelompok politik. Bantuan-bantuan material kerap kali datang ke pesantren sebagai buah dari konsensus politik yang dilakukan. Hal itu memunculkan rumor tentang politik uang yang sering dipelesetkan menjadi *hight cost politics*.

Semua asumsi di atas mengarah kepada kiai sebagai pengasuh pesantren di Bangkalan yang terlibat dalam pemerintahan, baik langsung ataupun hanya sekedar berdialog. Dalam perkembangannya, pesantren-pesantren di Bangkalan berkembang sangat pesat baik sarana prasarana maupun yang lainnya.

Perkembangan sarana dan prasarana di pondok di Bangkalan dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun ini sangat pesat, akan tetapi perkembangan tersebut tidak hanya disebabkan karena para pengasuhnya banyak mendapatkan bantuan dari pejabat publik di Bangkalan, melainkan juga karena banyak dibantu oleh para alumni pesantren serta program-program yang ditawarkan diterima oleh masyarakat serta kualitas pendidikan di pesantren ini.

Sebagian masyarakat ada yang menilai bahwa perkembangan yang sangat pesat di pesantren ini disebabkan para pengasuhnya ikut serta dalam pemerintahan baik dalam pada Pilkada ataupun penentuan kebijakan pendidikan. Sebagian masyarakat terkadang belum bisa memahami tujuan partisipasi tersebut.

menentukan proses-proses politik. Kedua, ada hubungan timbal-balik antara ekonomi dan politik yang sering disebut model ekonomi politik interaktif. Fungsi-fungsi politik dan ekonomi dianggap berbeda namun saling memengaruhi satu sama lain. Ketiga, terdapat hubungan perilaku yang berkelanjutan atau kontinu antara ekonomi dan politik. Martin Staniland, "What is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment", dalam Deliarnov, *Ekonomi Politik* (Jakarta: Erlangga, 2003), 9.

Kiai dalam mengelola pesantren di Bangkalan tidak menempuh jalan pintas dengan melibatkan diri dalam penentuan kebijakan pendidikan Islam yang dianggap cara yang cepat dan efektif untuk membangun jaringan donasi baru. Kiai juga tidak melakukan *bargaining* politik dengan para politisi yang memerlukan dukungan politik pesantren terkait kebijakan mereka, dengan melakukan tawar-menawar politik dengan kompensasi ekonomis. Karena pesantren-pesantren di Bangkalan sudah memiliki alumni dan wali santri cukup banyak yang siap membantu dari segi finansial.

Namun yang pasti, partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan Islam di Bangkalan adalah sebuah tradisi yang mengakar, seiring kuatnya pengaruh Bani Kholil di masyarakat serta kearifan lokal di Bangkalan yang masih kental akan budaya kepesantrenan. Dari hasil analisis penulis, partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan Islam di Bangkalan berdampak positif bagi perkembangan pendidikan Islam terkhusus pendidikan pesantren. Ini adalah bentuk sinergi ulama dan umara' yang mesti ada di setiap daerah.

3. Respon Masyarakat terhadap Partisipasi Kiai Pesantren dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan di Bangkalan

Perdebatan tentang partisipasi kiai dalam pemerintahan, baik terlibat sebagai pelaku kebijakan atau hanya sekedar dalam forum silaturahmi selalu berada dalam tarik-menarik dua kutub pendapat yang kontradiktif. Yakni antara pendapat yang mengabsahkan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar, serta pendapat yang mengkritiknya dengan keras sebagai pengingkaran terhadap

fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, yang seharusnya selalu menjaga independensi dan posisi politik.

Pendapat yang *pertama*, mengasumsikan bahwa komunitas pesantren, bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik sebagaimana warga negara lainnya. Hal ini didukung oleh argumentasi teologis yang membenarkan pilihan politik praktis. Pendapat ini semakin kukuh apalagi didukung oleh realitas semakin banyaknya pemimpin pesantren (kiai) yang terjun dalam pemerintahan langsung maupun tidak. Sebut saja R.KH. Amin Imron (cucu Syaikhona Kholil), R.KH. Fuad Amin (cicit Syaikhona Kholil sekaligus putra R.KH. Amin Imron), R.K. Makmun Ibnu Fuad (putra R.KH. Fuad Amin), KH. Syafik Rofi'i, KH. Imam Buchori Kholil, KH. Abdul Latif Amin, KH. Imron Amin, KH. Mondir Rofi'i, yang kesemuanya masih dzurriyah Syaikhona Kholil Bangkalan, serta beberapa kiai lain, termasuk beberapa kiai yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Pendapat *kedua*, mengkritik dengan keras, bahwa partisipasi kiai dalam pemerintahan baik yang telah masuk sistem atau sekedar dilibatkan dalam penentuan kebijakan lebih banyak bahaya dari pada manfaatnya.³⁵⁷ Hal ini mengacu pada realitas politik kekinian yang sering dianggap “kotor”, maka partisipasi kiai dalam pemerintahan bagaimanapun baik dan kokohnya landasan serta argumentasi teologisnya, akan ikut terseret kedalam dunia yang “kotor” pula. Perdebatan seperti ini memang tidak akan pernah selesai, sebab

³⁵⁷ Khoirudin, *Politik Kiai; Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis*, (Malang: Averroes Press, 2005), ix-x.

